

Aspek Sosio-Politik Petani Penyadap Karet Perempuan di Desa Hanua, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Evi Nurleni

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya.

The politics can be referred to as the relations of power. If so, then the gender relation is a relation of power, between the parties that dominate and are subordinated, that is the gender power relations in the struggle for access and control between women and men in the management of resources in the household. So it is important to know how the access and control of women and men who works as rubber tappers farmers is in the public and domestic domain in the Hanua village. This study of the socio-political conditions of rural women is in qualitative-descriptive perspective, and the data is collected with the sharing of life techniques in which 20 men and women used as informants and is analyzed using the gender framework analysis (GFA) or the Harvard analysis techniques. Hanua is the village in Kahayan watershed, where the main livelihood of the population is rubber tapper farmers. Actually, the Dayaks do not distinguish the status of men and women in the public sphere, but there is a distinction in the exercise of power in domestic and public environments, which the men power is higher than women. This is reflected from unequal women's access and control, both in the management of family income and investment.

Keywords: Access, Control, Power Relations, Public Participation.

Politik dapat disebut sebagai sebuah relasi kekuasaan. Jika demikian, maka relasi gender merupakan sebuah relasi kekuasaan, antara pihak yang mendominasi dan tersubordinasi, yakni relasi kekuasaan gender dalam perebutan akses dan kontrol perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan sumber daya dalam rumah tangganya. Sehingga penting untuk mengetahui bagaimana akses dan kontrol perempuan dan laki-laki petani penyadap karet dalam ranah publik dan domestik di Desa Hanua. Paparan mengenai aspek sosio-politik perempuan pedesaan ini bersifat kualitatif-deskriptif, dengan teknik pengumpulan data sharing of life dengan 20 informan laki-laki dan perempuan, dengan menggunakan kerangka analisis gender GFA (Gender Framework Analysis) atau teknik analisis Harvard. Desa Hanua merupakan desa di daerah aliran sungai Kahayan, di mana para penduduknya bermatapencaharian utama sebagai petani penyadap karet. Sebenarnya masyarakat Dayak tidak membedakan status laki-laki dan perempuan dalam ranah publik, namun dalam pelaksanaan kekuasaan baik dalam lingkungan domestik dan publik terdapat perbedaan, di mana kekuasaan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini terlihat dari perbandingan akses dan kontrol perempuan, baik dalam pengelolaan penghasilan dan investasi keluarganya. Kekuasaan laki-laki semakin menguat lagi dalam ranah publik dibandingkan perempuan terlihat dari partisipasi mereka dalam ranah publik. Hal ini terlihat dalam partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa dan kepemilikan tanah warisan keluarga, serta alokasi keuangan rumah tangga untuk investasi jangka panjang.

Kata kunci: Akses, Kontrol, Relasi Kekuasaan, Partisipasi Publik.

Pendahuluan

Tulisan ini dibuat dalam tema besar tentang realitas perempuan di ranah politik terutama di Kalimantan Tengah. Saya sengaja membawa arus yang berbeda dari pemahaman umum, ketika orang berbicara politik maka orang akan berbicara sesuatu yang “besar” atau yang disebut politik hanya milik mereka yang ada di arus pemerintahan dan arus legislatif saja. Tetapi jika kita melihat makna kata politik itu sendiri, maka sebenarnya kita akan menemukan sebuah strategi manusia untuk survive, yang berkaitan dengan hal kekuasaan yakni pertarungan berebut akses dan kontrol terhadap sumber daya. “Kate Millet mendefinisikan politik sebagai hubungan yang distrukturkan oleh kekuasaan di mana ada satu kelompok dikontrol oleh kelompok yang lainnya. ... Bahkan secara lebih jauh, feminisme sosialisme memandang bahwa cara-cara organisasi atau kelembagaan politik merupakan reflika dari pembagian jenis kelamin dalam masyarakat luas (Humm, Maggie 2002, 350).”

Kekuasaan adalah relasi antara dua orang yang merupakan atasan dan bawahan atau paramount agent dan subordinate agent, dimana terdapat struktur dominasi di dalamnya (Scott, John 2011, 202-204). Dan relasi gender pada dasarnya dilandasi oleh relasi kekuasaan, dalam pola kekuasaan patriakhi, dimana subyeknya adalah laki-laki dan perempuan, yang berakar dalam ranah privat dalam rumah tangga dan keluarga (Scott, John 2011, 205). Dalam “pertarungan”nya terdapat pihak yang didominasi dan pihak yang disubordinasi. Sehingga, saya menyimpulkan inilah pertarungan politik perempuan yang sesungguhnya, yakni perebutan kekuasaan dalam lingkungan hidupnya, termasuk relasi kekuasaan dalam rumah tangganya

maupun dalam relasi dalam ranah publik. Karena sebenarnya, apa yang terjadi di dalam rumah perempuan, itu sekaligus merupakan gambaran kondisi perempuan lingkungan sosialnya atau dalam reflika relasi pembagian jenis kelamin menurut Kate Miller di atas. Relasi kekuasaan gender seperti ini akan digambarkan dalam masyarakat desa Hanua di bawah ini.

Desa Hanua merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Secara administrasi pemerintahan, desa dikepalai oleh kepala Desa, yang secara geografis merupakan wilayah pemukiman di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan. Wilayah desa merupakan dataran rendah dengan ketinggian 50 meter di atas permukaan laut, dengan karakteristik pemukiman di sepanjang pesisir DAS (Daerah Aliran Sungai) Kahayan. Luas wilayah desa, menurut data kependudukan tahun 2011 35 km² di Desa Hanua, dengan kepadatan penduduk 8,8 orang perkilometer persegi (BPS Kab. Pulang Pisau 2013).

Mata pencaharian utama penduduknya ialah petani dan petambang emas liar (PETI). Wilayah desa banjir pada musim hujan dan kering pada musim kemarau. Sehingga, intensitas pekerjaan para petani penyadap sangat bergantung pada musim; pada musim kemarau mereka menyadap dan berkebun, sementara pada musim hujan dan banjir; kerja serabutan dengan menjadi pedagang, mencari ikan atau menambang emas.

Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan diperkirakan sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk
Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	
		Orang	%
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	39	10
2	Petani/Petambang	164	40
3	Pedagang/Angkutan	89	22
4	Tukang/Jasa	8	2
5	Pelajar/Mahasiswa	109	27
Total		409	100

Sumber data: Kecamatan Banama Tingang dalam Angka Tahun 2012, BPS Kab. Pulang Pisau.

Berdasarkan tabel di atas, maka pekerjaan utama penduduk adalah petani dan penambang atau sebesar 40 persen, selanjutnya 22 persen sebagai pedagang dan usaha angkutan, 10 persen lainnya sebagai PNS dan 2 persennya tukang atau jasa lainnya. Dengan data tersebut, maka akan dilakukan observasi lapangan dan pencacahan pekerjaan petani penambang. Sehingga, perkiraan jumlah penduduk yang bermatapencaharian sebagai petani dan penambang tersebut dirincikan sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Jumlah Penduduk yang Bermata Pencaharian sebagai Petani Petambang

No	Jenis Pekerjaan	Hanua		
		Orang	%	K K
1	Petani Campuran	59	36	19
2	Petambang/Penggali	51	31	17
3	Petani Penyadap	54	33	18
Total		164	100	54

Sumber data: Kecamatan Banama Tingang dalam Angka Tahun 2012, BPS Kab. Pulang Pisau dan Hasil Observasi

Berdasarkan data di atas, maka terdapat 59 orang atau 36 KK yang memiliki pekerjaan sebagai petani campuran (petani dan penambang juga), sementara sebanyak 51 orang atau 17 KK yang berkerja di penambangan saja dan sebanyak 54 orang atau 33 KK yang menjadikan petani penyadap karet saja. Perlu dicatat juga bahwa pada umumnya, masyarakat desa dapat menyadap karet, sebagai usaha sampingan bagi para PNS, pedagang dan penambang emas, jika penghasilan utama mereka tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Struktur administrator desa relatif lengkap, masing-masing terdiri dari 1 (satu) kepala desa, 1 (satu) sekretaris desa dan 5 (lima) Kepala Urusan Desa (KAUR) serta 4 (empat) RT (Rukun Tetangga) dan 1 (satu) kepala BPD (Badan Pertimbangan Desa) yang didominasi oleh kaum laki-laki. Dalam pelaksanaan tugasnya dilaksanakan dengan sistem manual dan kepercayaan. Perlu dicatat bahwa, tidak terdapat 1 (satu) orang perempuan pun dalam struktur kelengkapan desa tersebut. Ini merupakan salah satu indikasi lemahnya partisipasi perempuan dalam ranah pengambilan keputusan di desa Hanua.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Kecamatan Banama Tingang dalam Angka Tahun 2012, jumlah penduduk desa terdiri dari 409 orang, dengan jumlah kepala keluarga terdiri dari 105 KK. Sehingga, rata-rata anggota keluarga empat orang. Sementara jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, laki-laki berjumlah 221 orang dan perempuan berjumlah 188 orang. Jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan,

yakni laki-laki 53 persen dan perempuan 47 persen.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan kondisi masyarakat Desa Hanua di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengetahui:

- a. Bagaimana akses dan kontrol perempuan dan laki-laki petani penyadap karet dalam ranah publik dan domestik di Desa Hanua?
- b. Bagaimana kondisi kekuasaan perempuan dalam rumah tangga dan publik dalam masyarakat Desa Hanua?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan analisis gender GFA (Gender Framework Analysis) atau dikenal juga dengan teknik analisis Harvard. Analisis Harvard digunakan untuk melihat suatu profil atau mendeskripsikan peran gender dari suatu kelompok sosial, dalam tiga komponen profil yakni aktivitas, akses dan kontrol (Handayani dan Sugiharti 2002, 15-23). Teknik ini nantinya akan memberikan gambaran kondisi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan keuangan dan penghasilan keluarga, serta partisipasi perempuan dalam keputusan di lingkup publik yang berkaitan dengan usaha pertanian penyadap karet mereka.

Penelitian ini mendeskripsikan profil peran gender dalam masyarakat petani-penyadap karet dalam aktifitas produksi penyadapan karet, akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dan pemanfaatan produksi. Dalam hal ini, ingin memahami kondisi alamiah peran gender masyarakat dalam kelompok masyarakat marginal, yakni masyarakat petani-penyadap karet di Desa Hanua dan Desa Ramang.

2.2. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terbuka dan melakukan sharing life (berbagi pengalaman). Pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap, yakni:

1. Tahap pertama : pemetaan sosial, dengan alat yang digunakan kuesioner dan daftar tabel. Dimaksudkan sebagai data sekunder, untuk menentukan kelompok sasaran wawancara, yakni 20 informan.
2. Tahapan kedua: pemilihan 20 informan, dengan kriteria yaitu memiliki usaha utama dan sampingan sebagai petani-penyadap karet, memiliki tanaman karet sendiri (keluarga), memiliki pengalaman minimal 5 tahun dan mengetahui proses produksi karet dengan baik.
3. Tahapan ketiga: wawancara terbuka, dengan alat yang digunakan daftar pertanyaan terbuka sambil menggali berbagi pengalaman hidup informan. Digunakan sebagai data primer, yang nantinya akan dianalisa.

Teknik Analisis Data

Selain melakukan pemilihan dan pemilahan data, maka terdapat empat langkah dalam kerangka analisis gender tekni Harvard atau GFA sebagai berikut:

- a. Melakukan Profil aktifitas dengan melakukan identifikasi aktivitas yang dilakukan perempuan dan laki-laki (dengan asumsi pernyataan: siapa mengerjakan apa, kapan, dan di mana?)
- b. Melakukan Profil Akses dan Kontrol, melakukan identifikasi akses dan kontrol atas sumberdaya yang dimanfaatkan oleh perempuan dan laki-laki (dengan asumsi pernyataan: siapa mendapatkan apa? Siapa mengendalikan apa? Siapa menerima apa?)
- c. Melakukan profil terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian

Peran antara Laki-laki dan Perempuan, melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam pola pembagian kerja (profil kegiatan), akses dan kontrol terhadap sumberdaya (profil akses dan kontrol).

- d. Melakukan analisis Siklus Program melakukan identifikasi upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan aparat desa dan para informan maka diperoleh gambaran mengenai kondisi strata sosial ekonomi para petani karet di Desa Hanua.

Petani penyadap karet di Desa Hanua memiliki 3 (tiga) tipe, yaitu pertama, petani penyadap yang menyadap di kebun sendiri, tapi juga mempekerjakan buruh di kebun miliknya. Kedua, petani penyadap karet yang menyadap di kebun sendiri. Ketiga, petani penyadap karet yang bekerja atau buruh upah di kebun milik orang lain atau keluarga. Jika melihat tingkat kesejahteraannya, maka para petani penyadap buruh upah menempati posisi terendah, mereka yang bekerja di kebun sendiri posisi kedua, dan posisi atas ialah mereka yang mempekerjakan buruh upah dan bekerja sendiri. Para pemilik kebun menerapkan sistem bagi hasil terhadap para buruh upah, dengan 2 (dua) jenis, yakni pola 50:50 dan pola 60:40 (60 untuk buruh dan 40 untuk pemilik kebun). Jumlah petani penyadap karet berdasarkan tipenya sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Jumlah petani penyadap karet berdasarkan Tipe.

No	Jenis	Hanua
----	-------	-------

	Pekerjaan	Orang	%	KK
1	Tipe 1	18	33	6
2	Tipe2	26	48	8
3	Tipe 3	10	19	4
Total		54	100	18

Sumber data: Kecamatan Banama Tingang dalam Angka Tahun 2012 BPS Kab. Pulang Pisau dan Hasil Observasi

Ketika di tanya dimana posisi perempuan dalam tipe-tipe di atas? Maka mereka terutama single parent masuk dalam tipe 2 dan 3. Dalam peta kekuasaan, para perempuan adalah para buruh yang mengharapkan bagi hasil dari para pemilik kebun yang rata-rata adalah laki-laki. Jika pun ada para perempuan yang menjadi pemilik kebun, umumnya mereka terpaksa menjadi demikian, karena suami sudah meninggal dunia dan anaknya masih kecil atau bersekolah. Tetapi bagi perempuan yang suaminya meninggal dan tidak memiliki kebun, maka mereka akan menjadi buruh tani.

Jika kita melihat, aspek sosial antara kebun dengan pilihan jenis pengelolaan kebun, maka terdapat dua kondisi pemilik kebun dan para buruh, yang digambarkan berikut ini. Pertimbangan para pemilik kebun memakai jasa buruh upah, yakni pertama, karena sudah berusia lanjut dan tidak mampu mengejakan sendiri kebunnya. Kedua, membantu mereka yang tidak punya kebun sendiri supaya memiliki penghasilan. Ketiga, penghasilan keluarga tidak mencukupi, tetapi tidak memiliki pekerja di dalam rumah sendiri. Para petani penyadap karet ini mengidamkan bekerja di kebun milik sendiri, karena penghasilan jauh lebih memadai, dibandingkan menjadi buruh. Namun terkadang, akses perempuan terhadap tanah yang rendah menyebabkan para perempuan terpaksa

menjadi buruh di kebun milik orang lain.

Sementara itu, alasan para buruh upah bekerja di kebun milik orang lain, yaitu pertama, karena tidak memiliki kebun sendiri, dan kedua, penghasilan dari pohon karet milik sendiri tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Secara umum, para petani penyadap menjadi buruh upah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama pada saat harga jual karet turun atau sekitar 5.000 sampai dengan 7.000 per kwintalnya. Artinya, pilihan menjadi buruh pada kebun milik orang lain ini karena alasan ekonomi.

Penghasilan para petani penyadap karet ini sangat bergantung pada harga dari pembeli, baik pembeli lokal (di desa) atau tengkulak atau pembeli dari luar desa. Para pengumpul lokal ini memperoleh hasil dari keuntungan harga jual petani penyadap dengan para tengkulak yang datang dari Banjarmasin dan Palangka Raya. Tingkat kesejahteraan para pengumpul (pembeli) lokal ini relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan para petani penyadapnya sendiri. Semua informan mengatakan bahwa posisi tawar menawar harga berada di tangan para pembeli. Posisi tawar harga jual para petani penyadap karet sangat rendah.

a. Profil Akses Perempuan dan Laki-laki

Berdasarkan data lapangan maka para petani penyadap yang bekerja di kebun sendiri sebanyak 60 persen, sedangkan yang bekerja di kebun milik orang lain sebanyak 20 persen dan yang berkerja di kebun sendiri dan milik orang lain 15 persen. Menunjukkan bahwa akses terhadap kepemilikan tanah cukup baik. Sementara, akses perempuan terhadap kepemilikan lahan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Akses laki-laki terhadap kepemilikan

tanah 100 persen, sedangkan perempuan 66,6 persen.

Data di atas memperlihatkan bahwa akses perempuan terhadap sumber daya utama yakni kebun dan pohon karet sangat rendah. Hal ini berakibat terhadap status sosial dan kekuasaan perempuan dalam masyarakat. Atau dengan kata lain kekuasaan perempuan terhadap tanah dan kebun karet sangat rendah, sehingga perempuan ialah kelompok kaum miskin pedesaan yang sesungguhnya. Di antara masyarakat desa yang miskin, terdapat para perempuan yang jauh lebih miskin lagi.

Pengambil keputusan untuk menjual hasil karet, adalah siapa yang menyadap, baik laki-laki dan perempuan, dengan penerapan sebanyak 60 persen. Sisanya, 20 persen memutuskan menjual karet dengan menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi keluarga dan 20 persen lainnya meminta pertimbangan dari suami atau isteri. Sedangkan, pelibatan suami atau isteri terhadap keputusan penjualan karet, 85 persen dengan pertimbangan pasangan dan 15 persen yang tanpa pertimbangan pasangan. Data ini ingin memperlihatkan bahwa meskipun pada kenyataan perempuan bekerja sama dengan laki-laki, tetapi kekuasaan laki-laki terhadap keputusan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini berkaitan dengan pandangan masyarakat, bahwa laki-laki adalah kepala keluarga yang sebagai pengambil keputusan.

Gambaran mengenai akses pengambilan keputusan antara laki-laki dan perempuan ketika menjual hasil karet sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Gambaran Akses Perempuan dan Laki-laki Terhadap Keputusan Penjualan

No	Akses	Perempuan	Laki-Laki
1	Sumber keputusan menjual hasil karet olahan		
	a. Sendiri		
	b. Meminta Pertimbangan Suami/Isteri	66,7	50
	c. Meminta Pertimbangan Orang Tua	16,7	50
2	Pemberitahuan tentang penjualan karet		
	a. Memberitahukan suami/isteri	12,5	12,5
	b. Tidak memberitahukan suami/isteri	25	37,5

Jumlah pengambilan keputusan secara individu terhadap penjualan hasil karet lebih tinggi oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Keputusan untuk menjual karet setelah meminta pertimbangan pasangan lebih banyak dilaksanakan oleh laki-laki dari pada perempuan. Tetapi, pada umumnya pemberitahuan kepada pasangan mengenai penjualan hasil karet setara antara laki-laki dan perempuan. Artinya, walaupun hak pengambilan keputusan mengenai penjualan hasil karet berada di tangan individu yang menyadap, tapi terdapat kewajiban untuk memberitahukan kepada pasangan mengenai keputusan untuk menjual hasil karet. Dan pada kenyataan, laki-laki tetap menjadi penentu keputusan dalam keluarga.

Sementara itu, pemanfaatan hasil penjualan karet paling banyak

digunakan untuk konsumsi sehari-hari sebanyak 100 persen. Selain itu juga, sebanyak 75 persen yang memanfaatkan juga untuk kegunaan pendidikan anak dan 50 persen memanfaatkannya untuk kebutuhan pribadi. Artinya, pemanfaatan utama hasil penjualan karet ini digunakan untuk kebutuhan konsumsi keluarga, jika terdapat kelebihan digunakan untuk kebutuhan pribadi, kesehatan dan pendidikan anak.

Hal ini disebabkan oleh fluktuasi harga karet alam yang tidak menentu. Jika harga naik, maka kebutuhan keluarga tercukupi, bahkan dapat ditabung, tetapi jika harga turun, maka kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi sampai berhutang. Kondisi ini mendorong para petani penyadap ini, untuk sementara waktu beralih bekerja sampingan, seperti menambang emas. Namun, jika harga karet naik, maka pekerjaan utama sebagai petani penyadap tetap menjadi pilihan.

Pengelolaan keuangan dalam keluarga dikendalikan oleh perorangan, baik oleh laki-laki dan perempuan, dengan tetap meminta pertimbangan pasangan dan menyesuaikan kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan data lapangan, maka terdapat 65 persen yang mengendalikan seluruh pengeluaran dan penerimaan dalam keluarga, dan 35 persen yang melibatkan pasangannya. Dalam hal ini, berlaku anggapan bahwa isteri atau ibu lebih cocok untuk menjadi pengelola keuangan sebanyak 55 persen, perlu kerjasama antara suami dan isteri sebanyak 35 persen dan lebih cocok dikelola oleh suami 10 persen. Terdapat pembagian tanggung jawab pengelolaan keuangan dalam rumah, biasanya untuk konsumsi harian cocok dikelola oleh isteri, sementara pengelolaan untuk pendidikan anak dan kesehatan cocok dikelola oleh suami.

Selanjutnya, berikut ini gambaran tentang akses perempuan dan laki-laki terhadap pemanfaatan uang hasil penjualan karet, yaitu:

Tabel 3.3.
Gambaran Akses terhadap Pemanfaatan Uang Hasil Penjualan Karet

No	Akses	Perempuan	Laki-Laki
1	Pemanfaatan hasil penjualan karet	100	100
	a. Konsumsi Keluarga	66,7	87,5
	b. Biaya Pendidikan Anak	33,3	75
	c. Kebutuhan Pribadi	91,7	75
	d. Biaya Kesehatan Keluarga		
2	Pola investasi hasil penjualan karet	25	25
	a. Menabung di Bank	16,7	12,5
	b. Membeli Perhiasan Emas	66	50
	c. Memberi Perlengkapan Rumah Tangga	8,3	87,5
	d. Membuka lahan sendiri/baru		
3	Pola Pengelolaan pemanfaatan	83,3	37,5
	a. Dikelola sendiri	16,7	62,5
	b. Bekerjasama dengan suami/isteri		
4	Persepsi terhadap kecocokan pengelola keuangan	77	38
		8	13
		17	50

a.	Isteri		
b.	Suami		
c.	Kerjasama suami dan isteri		

Pemanfaatan uang hasil penjualan oleh laki-laki dan perempuan cenderung setara, yakni digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Sementara, yang memanfaatkannya untuk biaya pendidikan anak dan keperluan pribadi, laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Pemanfaatan untuk disimpan sebagai dana kesehatan keluarga lebih banyak oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Sementara, pilihan investasi hasil penjualan karet oleh perempuan dalam bentuk perhiasan emas dan perlengkapan rumah tangga, dan laki-laki dengan mengelola atau membuka lahan karet baru.

Berdasarkan dua data di atas, jelas bahwa kekuasaan laki-laki terbagi dalam dua ruang yakni publik dan domestik. Dimana yang berkaitan dengan konsumsi keluarga berada dalam kelola isteri, sementara yang berkaitan dalam hal investasi jangka panjang berada dalam kelola laki-laki. Berkaitan dengan posisi tawar, maka kekuatan laki-laki dalam ranah ekonomi dan hukum jauh lebih kuat dibandingkan perempuan, karena semua investasi jangka panjang atas nama suami atau laki-laki.

Selanjutnya, akses masyarakat petani penyadap karet terhadap bantuan pemerintah relatif cukup baik. Berdasarkan data lapangan maka 55 persen yang memperoleh bantuan dari pemerintah, baik yang berhubungan dengan penyadap karet ataupun kondisi soal masyarakat. Menurut beberapa pengakuan informan, distribusi bantuan sebenarnya tidak merata, karena dikendalikan oleh Dinas Kabupaten terkait dan aparat desa, bekerjasama

dengan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) di desa yang bersangkutan. Bagaimana kondisi perempuan? Akses perempuan dalam Gapoktan ini sangat minim, dalam pengertian tidak terlibat dalam perencanaan program, tetapi hanya sebagai penerima program. Bahkan ada sebagian besarnya tidak dilibatkan dalam rapat-rapat penetapan program; sehingga bergaining potition perempuan dalam bantuan pemerintah tidak ada.

Gambaran tentang akses laki-laki dan perempuan terhadap program bantuan untuk penyadap karet, sebagai berikut:

Sosial			
c. Pemerintah Kabupaten (IDT)			
d. GAPOKTAN			

Tabel 3.4.
Gambaran Akses Terhadap Program Bantuan untuk Penyadap Karet

No	Akses	Perempuan	Laki-Laki
1	Akses Terhadap Bantuan a. Pernah Menerima Bantuan b. Tidak Pernah Menerima Bantuan	58,3 41,7	62,5 37,5
2	Bentuk Bantuan yang di terima a. Bibit Karet b. Biaya Tebas Tebang Lahan c. Pupuk d. Raskin e. Tidak menjawab	16,7 16,6 0 8,3 58,3	25 12,5 25 0 37,5
3	Sumber bantuan: a. Dinas Pertanian b. Dinas kesejahteraan	16,7 8,3 8,3 0	50 0 0 12,5

Akses laki-laki terhadap program bantuan dari pemerintah lebih tinggi dibandingkan perempuan. Bentuk program yang diterima oleh perempuan dalam bentuk uang biaya tebas tebang dan bibit karet, sedangkan laki-laki menerima bantuan bibit karet dan pupuk. Yang menarik, perempuan menerima bantuan beras miskin (raskin) yang tidak diterima oleh laki-laki, sementara laki-laki menerima bantuan pupuk yang tidak diterima oleh perempuan. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan pemahaman bahwa perempuan lebih rentan terhadap kerawanan pangan dibandingkan laki-laki, sehingga bantuan lebih bersifat karitatif. Sementara, laki-laki dianggap sebagai modal, sehingga bantuan bersifat investatif.

Kondisi di atas sekaligus menggambarkan bagaimana kondisi sosial-politik perempuan di pedesaan pada umumnya. Bahwa akses perempuan terhadap sesuatu yang bersifat publik mengalami subordinasi atau mengalami penomorduaan. Penomorduaan ini terlihat dalam partisipasinya dalam keputusan keluarga dan perencanaan program dalam masyarakat. Bahwa akses perempuan dalam pengambilan keputusan sangat terbatas pada pemahaman masyarakat terhadap status gender. Perempuan memiliki peran reproduktif seperti konsumsi, mengasuh anak dan sebagainya, sementara laki-laki memiliki peran produktif, seperti pemilik modal, pengambil keputusan dan sebagainya.

c. Profil Kontrol Perempuan dan Laki-laki

Secara umum, kontrol masyarakat terhadap harga jual karet sangat lemah, harga sangat bergantung pada nilai tawar para tengkulak baik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan

maupun dari Tangkiling dan Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Selain, karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap harga karet mentah lokal dan dunia, juga disebabkan karena tuntutan ekonomi keluarga yang mendesak. Mengingat penghasilan utama para petani karet ini berasal dari hasil karet sadapan atau sebanyak 95 persen. Sehingga, dengan terpaksa para petani penyadap ini menjual karet berapapun harganya.

Gambaran kondisi kontrol laki-laki dan perempuan terhadap harga jual karet sebagai berikut:

Tabel 3.5.

Gambaran Kontrol Petani Karet terhadap Harga Jual Karet

No	Bentuk Kontrol	Perempuan	Laki-Laki
1	Melakukan Tawar Menawar Harga a. Pernah b. Tidak Pernah	50 50	75 15,5
2	Posisi Penentu Harga Jual a. Penjual b. Pembeli	16,7 91,7	12,5 87,5
3	Pengetahuan terhadap harga Jual Karet: 3.1. Kalimantan a. Mengetahui b. Tidak Mengetahui 1.1. Nasional a. Mengetahui b. Tidak Mengetahui 1.2. Dunia	25 75 8,3 91,7	12,5 87,5 0 100

	a. Mengetahui b. Tidak Mengetahui	0 100	0 100
--	--------------------------------------	----------	----------

Bentuk kontrol harga yang dilakukan baik laki-laki dan perempuan terhadap melakukan negosiasi harga dengan pembeli. Namun dalam negosiasi ini, baik laki-laki dan perempuan cenderung mengalah pada nilai tawar pembeli. Dalam hal ini, yang paling sering melakukan negosiasi harga itu kaum laki-laki dibandingkan perempuan. Sementara, pengetahuan tentang trend harga karet mentah Kalimantan, nasional dan dunia tidak diketahui oleh baik laki-laki dan perempuan. Alasannya mereka merasa tidak perlu tahu trend harga karet mentah, urusan mereka hanya memproduksi.

Sementara itu, kondisi kemampuan untuk memproduksi karet di Desa Hanua ini relatif tinggi. Jika dirata-ratakan dengan produksi karet di kecamatan Banama Tingang umumnya, lebih tinggi yakni berkisar antara 20 kilogram sampai dengan 100 kilogram perminggu. Dengan penghasilan perminggunya rata-rata Rp. 300.000 sampai dengan Rp. 1.000.000,-.

Hal ini berimbang juga dengan persepsi masyarakat bahwa pekerjaan menyadap karet ini dapat dijadikan sebagai jaminan hidup masa depan. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap proyeksi bidang pekerjaan dimasa depan. Walaupun menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, tetap harapan pertama atau sebanyak 75 persen, namun harapan kedua adalah bidang pekerjaan swasta sebanyak 30 persen. Pekerjaan swasta yang dimaksud di sini,

menjadi pedagang atau pengusaha (karet) yang sukses.

Gambaran kontrol produksi karet dan proyeksi masa depan terhadap anak oleh laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

Tabel 3.6.

Gambaran Kontrol terhadap Produksi Karet dan Proyeksi Masa depan

No	Akses	Perempuan	Laki-Laki
1	Jumlah Produksi Karet Perminggu a. 0 – 30 kg b. 31 – 60 kg c. 61 – 90 kg d. > 91 kg	33,3 33,3 25 8,3	12,5 12,5 25 50
2	Perhasilan Perminggu a. Rp.0 – Rp. 500.000,- b. Rp. 600.000 – Rp. 1.000.000 c. > Rp. 1.000.000	16,7 83,3 0	12,5 62,5 25
3	Harapan Usaha Masa depan a. PNS b. Swasta c. Petani Penyadap	83,3 33,3 8,3	62,5 25 25

Berdasarkan data di atas, maka penghasilan rata-rata laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Perempuan mampu memproduksi karet 10 sampai 90 kg perminggu, dengan penghasilan rata-rata Rp.600.000 sampai 1.000.000,- perminggu. Sementara dan laki-laki mampu memproduksi 31-100 kg, dengan penghasilan rata-rata

600.000 sampai di atas 1.000.000,- perminggu.

Sementara, harapan para ibu pekerjaan anak-anaknya dimasa depan sebagai PNS lebih besar dibandingkan laki-laki. Walaupun pada dasarnya menjadi PNS merupakan harapan terbesar ayah dan ibu. Bagi para orang tua, menjadi penyadap karet merupakan pilihan terakhir dari pekerjaan yang tersedia.

Pembahasan

a. Kekuasaan Perempuan dalam Rumah Tangga

Pertama, secara tradisional, perempuan dianggap memiliki tugas sebagai pengurus rumah dan keluarga. Walaupun pada kenyataannya perempuan dianggap mampu melakukan aktifitas menyadap karet, mengolahnya siap jual dan memutuskan untuk menjual, tetapi tugas utama perempuan adalah tugas rumah tangga, yakni memasak dan mengurus anak atau dengan angka persepsi sebanyak 85 persen. Atau dengan kata lain, domestik dianggap sebagai ranah penguasaan utama perempuan. Jika ada perempuan yang tidak pandai memasak, maka kemungkinan akan mendapat cemoohan masyarakat, misalnya.

Kedua, persepsi masyarakat mengenai aktifitas menyadap bagi perempuan menempati posisi kedua, yakni sebesar 75 persen. Namun jika melihat alasan, tentang kecocokan aktifitas ini dikenakan pada perempuan, maka ditemukan persepsi masyarakat yang berkaitan dengan kondisi budaya. Bahwa perempuan beraktifitas menyadap bukan sesuatu yang asing, namun dalam hal ini, aktifitas perempuan yang diutamakan untuk mengerjakan pekerjaan yang ringan, dengan angka persepsi 85 persen. Sementara, 15 persen berpersepsi dapat

mengerjakan semua aktifitas karena pasangan atau suaminya sedang sakit atau sudah meninggal dunia. Atau dengan kata lain, penguasaan terhadap skill dan “dunia kerja” bagi perempuan terdorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga dan kondisi yang memaksa, seperti suami sakit atau sudah meninggal. Jika suami masih ada maka penguasaan terhadap skill dan dunia kerja berada dalam kontrol laki-laki.

Ketiga, aktifitas pengelolaan keuangan dalam keluarga juga lebih banyak dianggap cocok dikelola oleh perempuan, dengan angka persepsi sebanyak 65 persen. Secara tradisional, alasan kecocokan perempuan menjadi pengelola ekonomi keluarga adalah karena perempuan lebih sering tinggal di dalam rumah dan mengetahui semua kebutuhan dalam rumah, serta dianggap lebih hemat dalam pengelolaan rumah tangga. Sementara, pengambilan keputusan dalam pengelolaan kebutuhan penting keluarga diputuskan bersama suami dan isteri. Sehingga, dalam hal ini, aktifitas pengelola keuangan dalam keluarga lebih pantas dilakukan oleh perempuan dari pada laki-laki. Dalam prakteknya, wilayah kelola perempuan dalam keuangan berkaitan dengan konsumsi sehari-hari, jika berkaitan dengan investasi atau tabungan berada dalam wilayah kelola laki-laki. Sehingga, posisi kekuasaan tetap berada dalam tangan kaum patriaki.

b. Kekuasaan Perempuan dalam Ranah Publik

Pertama, status sosial perempuan sebagai ibu dianggap sebagai sesuatu yang kodrati. Hal ini berpengaruh pada akses perempuan terhadap dunia sosial.

Akses terhadap keputusan menjual produk olahan karet secara ideal misalnya, walaupun masyarakat beranggapan berada di tangan yang bekerja dan kerjasama antara suami isteri. Namun data lapangan membuktikan berbeda, bahwa akses laki-laki atau suami lebih tinggi, yakni sebanyak 40 persen, dibandingkan dengan akses perempuan, yakni sebanyak 30 persen. Faktor yang mempengaruhi akses tersebut ialah status laki-laki atau suami sebagai kepala keluarga, dalam hal ini status perempuan atau isteri ialah sebagai pendamping keputusan suami. Hal ini menunjukkan terdapat konflik laten antara laki-laki dan perempuan, yakni perebutan sebagai orang yang "didengarkan" oleh masyarakat.

Masyarakat Dayak Ngaju sebenarnya menganut paham parental dan relatif setara dalam memperlakukan perempuan. Sehingga hak untuk didengarkan sebenarnya relatif sama. Namun pada kenyataannya, tidak demikian yang ditemukan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ranah publik. Misalnya jika kita melihat struktur administrasi desa, maka perempuan tidak dilibatkan di dalamnya pun juga dalam program-program pembangunan perempuan sebagai penikmat hasil. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi politik perempuan memang belum terpikirkan bagi masyarakat desa bahkan oleh perempuan sendiri, bahwa partisipasi politik perempuan menentukan posisi perempuan dalam program pembangunan.

Kedua, pemanfaatan utama hasil penjualan karet antara laki-laki dan perempuan terdapat kesamaan, yakni untuk keperluan konsumsi rumah tangga, kesehatan, pendidikan anak dan keperluan pribadi. Namun pemanfaatan sisa uang setelah membelanjakan

kebutuhan rumah tangga terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jika kaum laki-laki memanfaatkannya untuk menambah investasi, berupa kebun karet baru, sementara perempuan memanfaatkannya untuk membeli emas dan harta dalam rumah.

Faktor status sosial suami sebagai kepala keluarga menjadi faktor pendorong untuk melakukan investasi, sebagai wujud pemberi warisan kepada keturunan selanjutnya berupa tanah. Selain itu, disebabkan faktor budaya, laki-laki sebagai pemberi palaku (mahar) berupa tanah, sehingga penting untuk mewariskan sebidang tanah juga bagi anak laki-laki. Sementara, Sangat sedikit para petani penyadap ini yang memiliki akses pemanfaatan sisa penjualan untuk menabung di bank, karena faktor kebiasaan masyarakat yang cenderung menabung dalam perhiasan emas atau lainnya.

Walaupun dalam masyarakat Dayak Ngaju, umumnya berlaku palaku (mahar) sebidang tanah bagi perempuan. Namun dalam prakteknya, tanah itu bukan hak milik perempuan, tetapi dianggap sebagai harta bersama keluarga, yang hak warisnya berada di tangan anak laki-laki, sebagai pihak yang memberikan mahar. Hal ini menunjukkan bahwa akses dan kekuasaan perempuan terhadap tanah sangat lemah. Sehingga di ranah hukum waris, perempuan kurang mendapatkan tempat sebagai pihak yang sebenarnya merupakan pemilik awal tanah tersebut. Sehingga sesungguhnya perempuan desa tidak terdapat kemandirian ekonomi, tergantung pada struktur patriarki dalam masyarakat.

Ketiga, akses perempuan dan laki-laki terhadap pemanfaatan waktu luang cenderung terdapat perbedaan yakni ikut organisasi dan membersihkan rumah. Perempuan lebih banyak

menggunakan waktu luangnya untuk ruang domestik, sementara laki-laki di ruang publik. Hal ini dipengaruhi oleh paham masyarakat yang bias gender, yang menempatkan dikotomi publik dan domestik. Paham gender ini tidak hanya dianut oleh kaum laki-laki tetapi kaum perempuan juga, yang memang pemahaman gender yang demikian merupakan warisan turun temurun. Atau dengan kata lain, perempuan desa belum memikirkan organisasi sebagai aktifitas yang dapat digunakan sebagai kendaraan politik.

Kalaupun ada keterlibatan perempuan dalam organisasi, biasanya dalam organisasi keagamaan, itu pun yang berkaitan dengan kegiatan yang hak perempuan, misalnya seksi pelayanan perempuan (SPPer) di Gereja. Hal ini menunjukkan terdapat pemisahan aktifitas laki-laki dan perempuan di ranah publik. Bahwa kekuasaan utama dalam pengambilan keputusan di organisasi berada di tangan laki-laki, sementara kekuasaan perempuan dalam organisasi berkaitan dengan aktifitas yang paralel dengan aktifitas rumah tangganya.

Sehingga memang kondisi politik perempuan di pedesaan dapat dikatakan berada dalam level bawah, dengan tidak adanya keterlibatan dalam kepengurusan organisasi dan minimnya partisipasi perempuan dalam perencanaan program pembangunan.

Simpulan

Sebagaimana masyarakat Dayak pada umumnya, masyarakat Desa Hanua secara ideologis tidak membedakan status laki-laki dan perempuan dalam ranah publik atau cenderung setara. Namun dalam pelaksanaan kekuasaan baik dalam lingkungan domestik dan publik terdapat perbedaan perlakuan, di mana

kekuasaan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini terlihat dari perbandingan akses dan kontrol perempuan, baik dalam pengelolaan penghasilan dan investasi keluarganya. Kekuasaan laki-laki semakin menguat lagi dalam ranah publik dibandingkan perempuan terlihat dari partisipasi mereka dalam ranah publik.

Dalam lingkungan rumah tangga, urusan domestik masih dianggap sebagai ranah penguasaan utama perempuan, laki-laki hanya partisipan. Dan penguasaan terhadap skill dan "dunia kerja" berada dalam kontrol laki-laki, perempuan berpartisipasi di dalamnya karena terdorong kebutuhan ekonomi keluarga dan "terpaksa", seperti suami sakit atau sudah meninggal. Sementara, pengelolaan keuangan dalam keluarga perempuan dianggap lebih cocok daripada laki-laki, namun dalam pelaksanaannya wilayah kelola perempuan dalam keuangan berkaitan dengan konsumsi sehari-hari, jika berkaitan dengan investasi atau tabungan berada dalam wilayah kelola laki-laki. Sehingga, posisi kekuasaan tetap berada dalam tangan kaum patriaki.

Dalam lingkungan publik, kondisi partisipasi politik perempuan dalam kelembagaan desa dan organisasi sosial memang belum terpikirkan bagi masyarakat desa bahkan oleh perempuan sendiri. Sementara, akses dan kekuasaan perempuan terhadap tanah sangat lemah, sehingga sesungguhnya secara ekonomi perempuan desa tidak mandiri. Di sisi lain, pemanfaatan waktu luang memberikan akses lebih luas bagi laki-laki untuk terlibat dalam ranah publik. Sehingga kekuasaan utama dalam pengambilan keputusan dalam

kelembagaan desa berada di tangan laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Kris. 2003. *“Perempuan dalam Rumah Ber(Tangga).* dalam, Dr, Irwan Abdullah (ed), Sangkan Paran Gender. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- BPS Kabupaten Pulang Pisau. 2013. *Kecamatan Banama Tingang dalam Angka Tahun 2012.* Palangkaraya: BPS Kab. Pulang Pisau.
- Darwin, Muhadjir. 2001. *Prolog: Maskulinitas: Posisi Laki-laki dalam masyarakat Patriarkhi.* dalam Menggugat Budaya Patriarkhi. Yogyakarta : PPK UGM dan Ford Fondation.
- Fakih, Mansur. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender.* Malang: UMM Press.
- Humm, Maggie. 2002. *Ensiklopedi Feminisme.* Jakarta: Fajar Pustaka Baru.
- JURNAL STUDI GENDER & ANAK YINYANG, Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010 (Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto) ISSN: 1907-2791, hlm 17-34
- Scott, John. 2011. *Sosiologi (The Key Concept).* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simatauw, Meentje, dkk. 2001. *Gender dan Pengelolaan Sumber Sumber*

Daya Alam: Sebuah Panduan Analisis. Jogjakarta: Galang Printika.

No Name,
potensidaerah.ugm.ac.id/.../p18_...
, t.th. 4

Internet:

- Edinayanti (ed). 2011. Harga Karet di Pedalaman Barito Anjlok, sumber: <http://kalteng.tribunnews.com/2011/11/21/harga-karet-di-pedalaman-barito-anjlok>, diposkan Senin, 21 November.
- Sadikin, Ikin Dan Irawan, Rudi, Dampak Pembangunan Perkebunan Karet-Rakyat Terhadap Kehidupan Petani Di Riau, [http://ejournal.unud.ac.id/Abstrak/\(5\)Soca-Ikin-Sadikin-Dampak-Pemb-Perkbn\(1\).Pdf](http://ejournal.unud.ac.id/Abstrak/(5)Soca-Ikin-Sadikin-Dampak-Pemb-Perkbn(1).Pdf).
- Serikat Petani Karet, Pelatihan pembibitan SPKPH, tanggal Minggu, 18 September 2011, sumber : <http://serikatpetanikaret.blogspot.com/1>.
- Serikat Petani Karet, Bau tidak sedap ini mata pencaharian kami, dalam <http://serikatpetanikaret.blogspot.com/> diposkan tanggal Rabu, 30 November 2011.